



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia Nya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini melaporkan tingkat pencapaian pencapaian strategis dan indikator kinerja utama tahun 2025 yang dikaitkan dengan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023-2026 Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Sasaran Relevan Lainnya. Indikator Kinerja Utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,80 tahun (102% dari target 13,53 tahun), menunjukkan peningkatan akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 11,59 tahun (100,7% dari target 11,51 tahun), mencerminkan kualitas ketuntasan pendidikan masyarakat DKI Jakarta yang terus membaik.

Pada indikator Sasaran Relevan Lainnya, 8 dari 9 indikator pendukung berhasil mencapai target 100%. Capaian ini mencakup berbagai aspek strategis seperti Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Manajemen Risiko, serta Tindak Lanjut Rekomendasi BPK. Selain itu, pada indikator Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, tercatat capaian yang melampaui target dengan realisasi sebesar 93,82% dari target awal 71%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	6
C. Kedudukan Perangkat Daerah	8
D. Tugas Dan Fungsi	8
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	9
G. Sumber Daya Manusia.....	13
H. Tindak lanjut Evaluasi SAKIP Internal	14
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Tujuan Dan Sasaran Pada Rencana Strategis	17
B. Rencana Kinerja	19
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Akuntabilitas Kinerja	42
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja.....	44
B. Capaian Strategis Kinerja	48
C. Realisasi Anggaran	55
1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.....	55
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program	56
3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
C. Rencana Tindak Lanjut	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 1.2. Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	14
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026.....	18
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	19
Tabel 2.3. Indikator Program Pendukung IKU	20
Tabel 2.4. Indikator Kegiatan.....	21
Tabel 2.5. Faktor Penghambat Indikator Kegiatan.....	23
Tabel 2.6. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2025.....	42
Tabel 3.2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2025	44
Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya Tahun 2025	44
Tabel 3.4. Indikator Program Kerja Dalam Renstra Dinas Pendidikan	48
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	49
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja	51
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Dengan Capaian Nasional	52
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah dengan Capaian Nasional	53
Tabel 3.9. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja	55
Tabel 3.10. Realisasi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Berdasarkan Program Tahun 2025.....	56
Tabel 3.11. Realisasi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Berdasarkan Program Tahun 2025.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan.....

9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tujuan

Tujuan utama pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima;
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan;
4. Terwujudnya ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan peserta didik berkarakter mulia, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan;
5. Menjadikan setiap pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan secara rutin bagi setiap pendidik dan para tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan di Jakarta;
6. Memperkuat peran dan tanggung jawab P4 sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas dan profesional bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Jakarta, sehingga mereka mampu

- menjadi *the real educator, motivator dan inspirator* yang berkualitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan peserta didik yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di satuan pendidikan;
7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan;
 8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
 9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah;
 10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di pulau seribu;
 11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
 12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional;
 13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar satuan pendidikan;
 14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
 15. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai wadah kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
 16. Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja dan berdedikasi tinggi;
 17. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel;
 18. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
 19. Berjalanya sistem *e-catalogue* yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas pendidikan DKI Jakarta;
 20. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
 21. Terwujudnya pola kepemimpinan satuan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif;
 22. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiah, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik;
 23. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuhkan suburkan *life skill, work skill* dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan peserta didik.

C. Kedudukan Perangkat Daerah

- a. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
- d. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Dinas Pendidikan;
- e. Wakil Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- f. Kepala Dinas Pendidikan dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Dinas; dan
- g. Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

D. Tugas Dan Fungsi

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas :

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

“Menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.”

b. Fungsi

Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

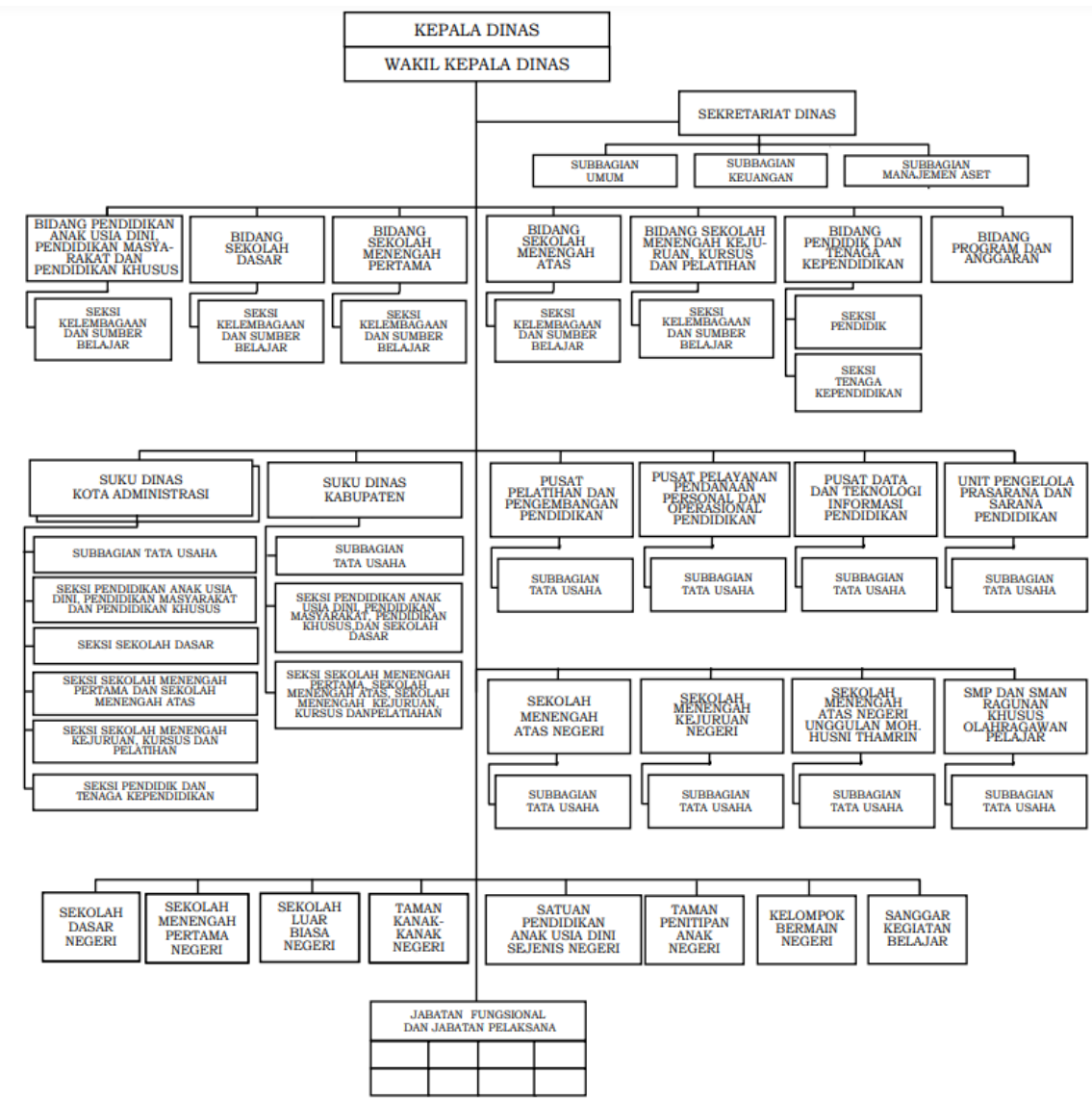
- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pendidikan;
- 4) Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 7) Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- 8) Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang pendidikan;
- 9) Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan satuan pendidikan;
- 10) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan;
- 11) Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- 12) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
- 14) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja pendidikan;
- 15) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan; dan
- 16) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Manajemen Aset,
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- e. Bidang Sekolah Dasar, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- f. Bidang Sekolah Menengah Pertama, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- g. Bidang Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- h. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan, yang membawahi Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar;
- i. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pendidik;
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan,
- j. Bidang Program dan Anggaran;
- k. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus;
 - 3) Seksi Sekolah Dasar;
 - 4) Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 - 5) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan;
 - 6) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- l. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus dan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan,
- m. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4), yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- n. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- o. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

- p. Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- q. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas:
 - 1) Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
 - 3) Taman Penitipan Anak;
 - 4) Kelompok Bermain;
- r. Sekolah Dasar;
- s. Sekolah Menengah Pertama;
- t. Sekolah Menengah Atas, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- u. Sekolah Menengah Kejuruan, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- v. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Moh. Husni Thamrin, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- w. Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- x. Sekolah Luar Biasa;
- y. Sanggar Kegiatan Belajar.

Selain itu, Pada Dinas Pendidikan dibentuk unit kerja non struktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
- b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pendidikan Kota;
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Pelaksana Tata Usaha pada Satuan Pendidikan.

F. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Dinas Pendidikan telah merumuskan 4 poin besar yang menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di DKI Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya DKI Jakarta pada tahun 2025 statusnya tidak lagi sebagai ibukota Negara, transformasi yang dilakukan adalah DKI Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis berskala global. Oleh karena itu Dinas Pendidikan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mewujudkan ide tersebut. Adapun keempat isu strategis yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan: masih rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang, PAUD, menengah dan khusus
2. Masih rendahnya kompetensi literasi dan numerasi peserta didik pada asesmen nasional
3. Belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik dikategorikan sebagai Pendidik dan Tendik Profesional
4. Masih rendahnya penyerapan lulusan SMK baik di DU/DI, berwirausaha, dan yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Pada dasarnya kondisi pendidikan di DKI Jakarta sudah cukup baik namun di beberapa jenjang pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Pada jenjang pendidikan PAUD di DKI Jakarta masih cukup rendah, padahal pendidikan PAUD memiliki peranan yang penting bagi perkembangan tumbuh kembang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif pada perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik pada masa mendatang. Untuk itu Dinas Pendidikan memberikan perhatian khusus pada angka partisipasi jenjang PAUD, karena masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses ke PAUD.

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya SMA/SMK dan MA angka partisipasi sekolah (APS) pada tahun 2025 masih cukup rendah yaitu 77,86% (sumber: BPS-RI). Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena masih banyak anak lulusan SMP/MTs yang tidak bisa melanjutkan ke SMA/SMK, dan MA. Pemerintah sudah menetapkan wajib belajar 12 tahun sehingga memiliki konsekuensi untuk menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menyediakan pelayanan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK dan MA. Pendidikan SMK juga mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta akan berubah menjadi pusat ekonomi global. Oleh karena itu lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja DU/DI. Sehingga lulusan SMK banyak yang terserap di DU/DI sepenuhnya.

Pada jenjang pendidikan khusus masih terdapat anak-anak disabilitas yang tidak dapat mengakses pendidikan, khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk sekolah-sekolah negeri masih terdapat kekurangan guru pendamping khusus dan pelatihan guru inklusi. Selain jumlah SLB negeri juga masih belum memenuhi untuk menampung anak-anak disabilitas sehingga pembukaan sekolah baru atau ruang kelas baru menjadi isu yang prioritas bagi dinas pendidikan.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan pendidik dan tenaga pendidik yang profesional. Pendidik dan tenaga pendidik harus bisa membaca perubahan zaman yang terjadi sehingga dalam proses pembelajaran dapat menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi bidang ilmu, kompetensi kognitif, kompetensi intrapersonal, dan kompetensi interpersonal. Selain itu tantangan bagi Pendidik saat ini dunia tengah berada pada kondisi yang diistilahkan sebagai VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*). Kondisi ini adalah di mana dunia bisnis dan sosial penuh perubahan yang sangat cepat, tidak stabil serta tidak terduga, ketidakpastian informasi karena banyaknya informasi di berbagai platform baik media sosial ataupun media konvensional, dan kompleksitasnya permasalahan karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Untuk

itu penting bagi pendidik untuk dapat membaca situasi saat ini agar peserta didik yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dunia saat ini.

Berangkat dari sejumlah kajian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga nasional maupun internasional, indeks literasi numerasi peserta didik kita masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Peringkat literasi yang masih rendah juga berimbas kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia (SDM) di sebuah negara. Ditilik dari skor IPM, Indonesia juga masih menempati level yang tidak menggembirakan terlebih jika dibandingkan dengan peringkat sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berangkat dari data dan fakta yang ada, penguatan kecakapan literasi dasar merupakan keniscayaan dan menjadi sesuatu yang tak dapat ditawar.

G. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pegawai, baik yang merupakan jabatan struktural dan fungsional (guru) sebagai berikut :

Tabel 1.1. Data Pegawai Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Data		Satuan
		Januari 2025	Desember 2025	
1	Tenaga Kependidikan :			
a.	Pejabat Eselon	227	298	Orang
b.	Ketua Sub Kelompok	13	15	Orang
c.	Pejabat Pelaksana :			
	▪ Tenaga Kependidikan PNS	199	193	Orang
d.	Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan :			
	▪ Tenaga Kependidikan PNS	1347	1765	Orang
	▪ Tenaga Kependidikan Non ASN (KKI)	9162	8682	
2	Jabatan Fungsional :			
a.	Jabatan Fungsional Guru :			
	▪ Guru PNS ▪ Guru PPPK ▪ Guru Non ASN (KKI)	41208	50827	Orang
b.	Jabatan Fungsional Non Guru :			
	▪ Pengawas Sekolah	96	79	Orang
	▪ Penilik	42	41	
	▪ Pamong Belajar	23	20	
	▪ Arsiparis	12	13	
	Total	52329	61933	Orang

H. Tindak lanjut Evaluasi SAKIP Internal

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hasil evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta rekomendasi Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 1.2. Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).	
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa : a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengumpulan data kinerja dan	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa : a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Keterangan
				pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. e. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. e. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,50	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	
4.	Evaluasi Internal	25%	22,00	Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Agar para Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		100%	85,00			

Catatan: Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dari Inspektorat belum rilis sehingga data yang ditampilkan adalah data tahun sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Target Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025, realisasi tahun 2025 dan capaian kinerja tahun 2018-2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum, tugas dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dasar hukum, dan sistematika penyajian laporan kinerja.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan pengukuran kinerja 2025 berupa target capaian kinerja organisasi, realisasi capaian kinerja organisasi, perbandingan realisasi capaian dengan tahun sebelumnya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbandingan dengan target nasional, serta realisasi anggaran program yang mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan realisasi anggaran berdasarkan unit kerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dan saran dari pimpinan perangkat daerah serta menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Dan Sasaran Pada Rencana Strategis

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Visi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua

Misi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokrasi dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang berkaitan dengan urusan pendidikan adalah Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Sasaran pada RPD 2023-2026 adalah Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat, dengan Indikator Indeks Dimensi Pendidikan.

Dalam rangka menerjemahkan tujuan dan sasaran RPD 2023-2026, Dinas Pendidikan merumuskan tujuan dan sasaran Renstra 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra	Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan Dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,09	13,11	13,13	13,15
			Terjaminnya Akses Dan Layanan Serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,19	11,21	11,23	11,25

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator yang akan digunakan dimana definisi operasional dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan : Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan Sasaran: Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat.										
Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir
		T	C	T	C	T	C	T	C	
Indeks Dimensi Pendidikan	12,12	12,14	12,39	12,16	12,5	12,18	12,69	12,20	-	12,20

Keterangan : T (Target), C (Capaian)

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Dinas Pendidikan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sudah melampaui target Renstra tahun 2026.

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengampu Misi 1 yaitu:

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

Mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tuntas, menyeluruh, cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis serta berkarakter. Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat bekerja di mancanegara.

Visi yang disebutkan diatas adalah cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi komitmen dan tantangan bagi segenap Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;
- 2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- 3. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
- 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- 5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;
- 6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

B. Rencana Kinerja

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
			Target	Capaian
Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,35	13,80
	Terjaminnya Akses dan Layanan Serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11,48	11,59

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kinerja, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2025 memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator sasaran. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih fokus.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian Kinerja organisasi. Berikut ini program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Indikator Program Pendukung IKU

Program	Indikator Program	Tahun 2025		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	80,59	88,22	109,47%
	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	49,44	89,17	180,36%
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	90,83	93,14	102,54%
	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	82,32	94,63	114,95%
	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,19	99,03	99,84%
	Persentase guru profesional	88,8	89,63	100,93%
	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	84,04	72,96	86,82%
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	82,98	86,1	103,75%
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	66,27	82,41	124,35%
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	22,59	66,25	293,27%
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%

Dari Indikator Program Pendukung IKU terdapat 2 (dua) Indikator Program yang tidak tercapai, yaitu :

1. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
2. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A

Dari kedua indikator program di atas, terdapat faktor penghambat yaitu masih adanya anak tidak sekolah (ATS) yang disebabkan karena anak yang tereksplotasi secara ekonomi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menikah di usia dini, disabilitas/gangguan mental pada anak, bullying, ketiadaan pengasuhan orang tua, bekerja karena kebutuhan ekonomi. Untuk Capaian Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A belum optimal akibat adanya efisiensi anggaran pada BAN-PDM yang berdampak pada terbatasnya kuota pelaksanaan akreditasi. Kondisi ini terutama mempengaruhi satuan pendidikan yang saat ini berstatus terakreditasi B dan direncanakan untuk dilakukan penilaian ulang guna peningkatan status menjadi akreditasi A pada tahun berjalan.

Selain indikator program pendukung IKU, juga terdapat kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Indikator Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Capaian	
Program Pengelolaan Pendidikan				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	68,25	66,75	97,80%
	Indeks Iklim Keamanan SMA	76,87	75,67	98,44%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	76,80	76,00	98,96%
	Persentase SMA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	93,84	97,08	103,45%
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA / MA / Sederajat	100,00	100,00	100,00%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	86,62	86,01	99,30%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	75,09	73,48	97,86%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Inklusivitas SMK	65,23	67	102,71%
	Indeks Iklim Keamanan SMK	73,82	83	112,44%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	73,19	72	98,37%
	Persentase guru produktif SMK yang memiliki pengalaman magang di dunia kerja	59,22	66,48	112,26%
	Persentase SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	75,88	97,85	128,95%
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMK	100	100	100,00%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	78,83	83,00	105,29%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	66,28	72,00	108,63%
	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	80,86	82,00	101,41%
Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	73,36	62,99	85,86%
	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	60,81	65,65	107,96%
	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	65,12	62,82	96,47%
	Indeks Iklim Keamanan SDLB	74,39	77,56	104,26%

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Capaian	
	Indeks Iklim Keamanan SMALB	71,87	74,92	104,24%
	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	69,31	73,57	106,15%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SDLB	74,33	76,14	102,44%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMALB	74,43	75,48	101,41%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMPLB	71,47	73,35	102,63%
	Persentase SLB yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	98,5	98,85	100,36%
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	40,64	70,23	172,81%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	52,59	81,04	154,10%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	53,68	79,87	148,79%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	48,27	58,88	121,98%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	54,45	70,62	129,70%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	53,57	68,86	128,54%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Indeks Iklim Inklusivitas SD	65,14	68,34	104,91%
	Indeks Iklim Keamanan SD	78,61	80,18	102,00%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	77,25	76,95	99,61%
	Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	97,75	98,38	100,64%
	Persentase Tingkat Penyelesaian SD / Mi / Sederajat	100	100	100,00%
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	73,95	73,53	99,43%
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	62,23	69,21	111,22%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	65,15	66,53	102,12%
	Indeks Iklim Keamanan SMP	75,52	75,69	100,23%
	Indeks Iklim Kebhinekaan SMP	74,65	75,63	101,31%
	Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	86,33	97,97	113,48%
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMP / MTs / Sederajat	100	100	100%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	83,13	85,76	103,16%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71,62	72,72	101,54%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	77,45	81,82	105,64%

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Capaian	
	Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD	85,00	82,14	96,64%
	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	78,69	98,31	124,93%
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang BerStandar Nasional Pendidikan	60,00	79,90	133,17%
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%

Dari Indikator Kegiatan Pendukung IKU terdapat Indikator Kegiatan yang tidak tercapai, yaitu:

Tabel 2.5. Faktor Penghambat Indikator Kegiatan

No.	Indikator Kegiatan	Faktor Penghambat
1.	Persentase Siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti PAUD	1. Miskonsepsi orang tua/masyarakat yang belum memahami Pentingnya Layanan PAUD 1 Tahun sebelum SD. 2. Terdapat Penduduk yang memiliki KTP DKI Jakarta yang tidak tinggal dan tidak menyekolahkan anaknya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 3. Terdapat anak usia dini yang didaftarkan di bimbingan belajar calistung untuk usia dini yang tidak memiliki izin operasional. 4. Terdapat anak usia dini yang sudah bersekolah di Sekolah Dasar (SD).
2.	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	1. Ketidaksesuaian instrumen survei lingkungan belajar (Surlingjar) dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Kompleksitas dan pendekatan soal Surlingjar lebih menekankan persepsi kognitif, verbal, dan mandiri, sehingga tidak merepresentasikan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus

No.	Indikator Kegiatan	Faktor Penghambat
		2. Pendekatan pembelajaran SLB bersifat <i>high touch</i> yang tidak terakomodasi dalam instrumen penilaian. Pembelajaran di SLB membutuhkan sentuhan, rabaan, pendampingan langsung, dan interaksi emosional sebagai bagian dari proses belajar 3. Keterbatasan kemampuan peserta didik dalam memahami dan merespons instrumen survei. Peserta didik tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan autisme memiliki keterbatasan komunikasi dan persepsi abstrak. 4. Instrumen belum mempertimbangkan pendekatan emosional dan sensorik. Peserta didik autisme dan disabilitas intelektual memerlukan pendekatan emosional (misalnya pelukan terapeutik) untuk menciptakan rasa aman
3.	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	5. Ketidakesesuaian instrumen survei lingkungan belajar (Surlingjar) dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Kompleksitas dan pendekatan soal Surlingjar lebih menekankan persepsi kognitif, verbal, dan mandiri, sehingga tidak merepresentasikan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus 6. Pendekatan pembelajaran SLB bersifat <i>high touch</i> yang tidak terakomodasi dalam instrumen penilaian. Pembelajaran di SLB membutuhkan sentuhan, rabaan, pendampingan langsung, dan interaksi emosional sebagai bagian dari proses belajar 7. Keterbatasan kemampuan peserta didik dalam memahami dan merespons instrumen survei. Peserta didik tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan autisme memiliki keterbatasan komunikasi dan persepsi abstrak. 8. Instrumen belum mempertimbangkan pendekatan emosional dan sensorik. Peserta didik autisme dan disabilitas intelektual memerlukan pendekatan emosional (misalnya pelukan terapeutik) untuk menciptakan rasa aman
4.	Indeks Iklim Kebhinekaan SD	Penetapan target kinerja belum sepenuhnya merefleksikan tren capaian riil pada tahun sebelumnya, sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih akurat antara standar nasional dengan kondisi objektif di lapangan

No.	Indikator Kegiatan	Faktor Penghambat
5.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Penetapan target kinerja belum sepenuhnya merefleksikan tren capaian riil pada tahun sebelumnya, sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih akurat antara standar nasional dengan kondisi objektif di lapangan.
6.	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	Ketidaksesuaian waktu, target ditetapkan tahun berjalan, namun capaian baru diperoleh tahun depan.
7.	Indeks Iklim Keamanan SMA	1. Ketidaksesuaian waktu, target ditetapkan tahun berjalan, namun capaian baru diperoleh tahun depan. 2. Belum sinergi antara Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), guru wali, dengan wali kelas.
8.	Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	1. Ketidaksesuaian waktu, target ditetapkan tahun berjalan, namun capaian baru diperoleh tahun depan. 2. Belum sinergi antara Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), guru wali, dengan wali kelas.
9.	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Ketidaksesuaian waktu, target ditetapkan tahun berjalan, namun capaian baru diperoleh tahun depan.
10.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Ketidaksesuaian waktu, target ditetapkan tahun berjalan, namun capaian baru diperoleh tahun depan.
11.	Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	a. Belum optimalnya kebijakan kebhinekaan dalam praktik Satuan Pendidikan, karena kebijakan masih bersifat normatif dan belum diterjemahkan ke dalam SOP dan pembelajaran b. belum optimalnya layanan pendampingan peserta didik, termasuk penanganan kasus intoleransi atau diskriminasi, karena belum adanya penanggung jawab khusus untuk pendampingan peserta didik.

C. Perjanjian Kinerja

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (Perkin) tertuang di dalam dokumen indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, yang didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target.

Penetapan Indikator Perkin dipresentasikan dan tertuang di dalam dokumen Indikator Perkin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, dimana di dalamnya memuat indikator kinerja serta terdapat sasaran strategis maupun indikator kinerja termasuk target capaian untuk masing-masing indikator kinerja. Berikut ini program kegiatan yang tertuang di dalam Indikator Perkin Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Sigma dari rasio jumlah penduduk berusia ≥ 7 tahun yang bersekolah pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ≥ 7 tahun pada tahun tersebut HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	N/A	N/A	N/A	13,53	13,53	Tahun
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	N/A	N/A	N/A	11,51	11,51	Tahun
Sasaran Relevan Lainnya									
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah (Sekdis-Humas)	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Persentase dipublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Persentase respon terhadap krisis komunikasi.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
		strategis pada saat krisis komunikasi program	d) Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Penghitungan: a) Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b) Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c) Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d) Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
2	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.	5	25	55	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
	(Sekdis-Manset)	Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Penghitungan: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login						
3	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas (Pusdatin)	Nilai kualitas data SDI	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Kepgub No. 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui walidata Pendukung kepada walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui walidata Pendukung kepada walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui walidata Pendukung kepada walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata/ Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P&A)	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan	N/A	30%	N/A	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 3. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Formula Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			Sumber Data : 1. Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) 3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: Stabilize).						
5	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan	10	40	70	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
	(PTK)		komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran :						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
6	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko (P&A)	Persentase Implementasi Penerapan	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
		Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
7	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi (P&A)	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Dasar Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persentase

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
			Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; 2. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; 3. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan 4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
8	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Metode Pengukuran : Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	Indeks

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahun	Ket
				I	II	III	IV		
	(Sekdis - Humas)		Sumber Data : Jaksurvei						
9	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data: Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi
- Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Utama					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,53	13,8	102%
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,51	11,59	100,7%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Pada tahun 2025 target Harapan Lama Sekolah adalah 13,35 tahun dengan realisasi 13,80 tahun sehingga capaian di tahun 2025 adalah 102%. Faktor pendorong keberhasilan capaian yaitu:
- a. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU.
 - b. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
 - c. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.
 - d. Pemberian bantuan sosial dana pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa.
2. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- Pada tahun 2025, target Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,48 tahun, dengan realisasi 11,59 tahun, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100,7%. Sama seperti keberhasilan Harapan Lama Sekolah, faktor pendorong keberhasilan capaian Rata-rata Lama Sekolah yaitu :
- a. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
 - b. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp 10.908.891.053.438 dan realisasi Rp 10.463.359.942.984 atau 95,92% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp 4.337.611.901.202 dan realisasi Rp 4.151.142.861.815 atau 95,70%.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp 2.282.749.255.950 dan realisasi Rp 2.225.887.355.287 atau 97,51%.
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp 1.686.212.549.271 dan realisasi Rp 1.606.099.018.413 atau 95,25%.
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp 2.023.664.292.259 dan realisasi Rp 1.917.102.970.751 atau 94,73%.
 - 5) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp 107.519.049.015 dan realisasi Rp 102.912.168.555 atau 95,72%.
 - 6) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp 192.646.081.441 dan realisasi Rp 185.791.906.492 atau 96,44%.
 - 7) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp 278.487.924.300 dan realisasi Rp 185.791.906.492 atau 98,54%.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp 8.695.075.720.230 dan realisasi Rp 8.045.245.683.227 atau 92,53% melalui anggaran yang terdapat di dalam kegiatan:
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 8.530.861.598.001 dan realisasi Rp 7.900.848.506.269 atau 92,61%.
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 29.285.516.525 dan realisasi Rp 27.788.343.306 atau 94,89%.
 - 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 68.591.183.040 dan realisasi Rp 54.629.699.890 atau 79,65%.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 3.171.221.801 dan realisasi Rp 3.007.114.135 atau 94,83%.
 - 5) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp 5.202.081.539 dan realisasi Rp 4.956.050.984 atau 95,27%.
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp 56.978.948.956 dan realisasi Rp 53.325.925.643 atau 93,59%.

- 7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 985.170.368 dan realisasi Rp 690.043.000 atau 70,04%.

Untuk menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah, Dinas Pendidikan juga melakukan inovasi yaitu Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun.

Keberhasilan pencapaian IKU Dinas Pendidikan, terutama pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi pengeluaran. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta dan capaian Nasional dari tahun 2020 hingga 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2025

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DKI JAKARTA	80,77	81,11	81,65	82,46	84,15	85,05
INDONESIA	71,94	72,29	72,91	73,55	75,02	75,90

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, BPS

2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Relevan Lainnya Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Selisih
Sasaran Relevan Lainnya						
1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persentase	100	100	100%	-
2	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada	Persentase	100	100	100%	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Selisih
	Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang					
3	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%	-
4	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase	80	100	100%	
5	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persentase	100	100	100%	
6	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase	100	100	100%	
7	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persentase	71	93,82	132,1%	
8	Survei Kepuasan Masyarakat	Persentase	88,70	83,25	93,85%	
9	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100	100	100%	

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator, sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah
Target indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis daerah adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program prioritas dan strategis daerah adalah tersusunnya paparan dan terpublikasinya program prioritas dan program umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Capaian Indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
Target Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor penghambat capaian indikator Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2025 di masing-masing PD/UKPD tahun 2025 terjadi karena banyak faktor diantaranya jumlah buku di lingkungan Dinas Pendidikan sangat banyak, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus barang dan fasilitas penunjang bagi pengurus barang yang belum lengkap dan memadai, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara sekolah, UPT, Dinas Pendidikan, BPAD, dan birokrasi.

3. Capaian Indikator Nilai kualitas data SDI

Target Nilai kualitas data SDI adalah 3,25 dengan realisasi 3,25, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian ketersediaan data yang lengkap yang dilatarbelakangi oleh kedisiplinan sekolah mengisi Dapodik dan peran Dinas Pendidikan yang selalu menghimbau sekolah untuk melakukan sinkronisasi Dapodik, serta membantu penyelesaian permasalahan Dapodik yang dialami oleh sekolah, Indikator Nilai kualitas data SDI sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Tahun 2024 adanya UPT Pusdatin Pendidikan yang salah satu tugasnya untuk mengelola data pendidikan.

4. Capaian Indikator Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Target Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah 80% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%, Faktor yang perlu menjadi catatan karena adanya pelaksanaan pengadaan produk dalam negeri pada belanja barang yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja barang/jasa dan belanja modal di satuan pendidikan sudah diatur dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2022 yaitu dengan sistem daring menggunakan SipLah, sementara SipLah belum terintegrasi dengan bigbox LKPP Kemendagri RI.

5. Capaian Indikator Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar

Target Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan tahun 2025 yaitu adanya SDM yang menangani penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.

6. Capaian Indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Target Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor

pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko tahun 2025 yaitu perencanaan dan pelaporan telah didukung oleh sistem informasi sehingga bersifat transparan dan akuntabel, serta penyerapan anggaran setiap program yang di atas 92%. Dinas Pendidikan secara rutin berkoordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Manajemen Resiko sampai Penangan risiko.

7. Capaian Indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

- a. Bobot capaian keluaran sub kegiatan (BCKK)
- b. Bobot Efisiensi (BE)
- c. Bobot Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (BK)
- d. Bobot Penyerapan Anggaran (BP)

Pada indikator kinerja di atas Dinas Pendidikan sudah optimal dalam penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp10.908.891.053.438 dan realisasi 10.463.359.942.984 atau 95,92%. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp8.695.075.720.230 dan realisasi 8.045.245.683.227 atau 92,53%.

8. Capaian Indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Target indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah 88,70% dengan realisasi 83,25%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 93,85%. Faktor penghambat capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah jumlah responden yang cukup banyak dan tidak semua masyarakat merasa puas atas kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan, meskipun demikian Dinas Pendidikan akan terus meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat terus meningkat.

9. Capaian Indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Target indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu semakin banyaknya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sesuai target.

B. Capaian Strategis Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.4. Indikator Program Kerja Dalam Renstra Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI
					2025
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase (%)	80,59	88,22
		Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase (%)	49,44	89,17
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase (%)	90,83	93,14
		Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase (%)	82,32	94,63
		Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase (%)	99,19	99,03
		Persentase guru profesional	Persentase (%)	88,8	89,63
		Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase (%)	84,04	72,96
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	82,98	86,1
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase (%)	66,27	82,41
		Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase (%)	22,59	66,25
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Index	4	4

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2020–2025 dan Renstra tahun 2023-2026 pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	IKU	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,40	80,77										
2		Harapan Lama Sekolah	Nilai			13	13,07	13,07	13,08	13,09	13,33	13,35	13,51	13,53	13,80
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Indeks	3,200	3,171										
4	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Persen tase	11,55	11,17	11,19	11,20	11,20	11,31	11,33	11,45	11,48	11,49	11,51	11,59
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	100	100	91	91,5	91	91,02						

Pada Tahun 2020 Dinas Pendidikan mengampu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Skor EKPPD, Rata-rata Lama Sekolah dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran sesuai tujuan SKPD pada Renstra Tahun 2023-2026. Pada realisasi indikator IPM tahun 2020 dan tahun sebelumnya terus meningkat tiap tahunnya dan selalu mencapai target dari yang telah ditetapkan. Begitupun dengan indikator skor EKPPD, capaian tahun 2020 masih menggunakan angka realisasi tahun 2018 karena angka capaian belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri, untuk Rata-rata lama sekolah dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran juga selalu mencapai target.

Akan tetapi pada tahun 2021, berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan yang juga sesuai dengan arahan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan tidak lagi mengampu Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan pada indikator tersebut terdiri lebih dari satu komponen pembentuk, sehingga tidak saja diampu oleh Dinas Pendidikan tetapi juga SKPD lain. Oleh sebab itu pada tahun 2021 Dinas Pendidikan mengampu indikator tujuan SKPD yaitu Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 13,08 tahun dari target tahun 2022 yaitu 13,07 tahun, sedangkan pada indikator tujuan skor EKPPD juga tidak digunakan lagi.

Pada Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah, realisasi tahun 2020 hingga 2025 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun bila dibandingkan dengan target tahunan 2020 realisasi berada dibawah target, serta pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi RLS melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu juga pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi tahun 2020 hingga 2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Program	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	88,22	100	100	100
2	Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	89,17	100	100	100
3	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	93,14	35	45	93,14
4	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	94,63	100	82,32	94,63
5	Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	99,03	100	100	100
6	Persentase guru profesional	Persentase	89,63	88,5	89,6	90,7
7	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,96	72,56	72,75	72,96
8	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	86,1	69,92	82,98	86,1
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Persentase	82,41	62,5	66,27	82,41

- 1) Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 88,22 (tidak tercapai).
- 2) Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 100 serta capaiannya 89,17 (tidak tercapai).
- 3) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 45 serta capaiannya 93,14 (tercapai).
- 4) Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 82,32 serta capaiannya 94,63 (tercapai).
- 5) Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 100 serta capaiannya 99,03 (tidak tercapai).
- 6) Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 89,60 serta capaiannya 89,63 (tercapai).

- 7) Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 72,75 serta capaiannya 72,96 (tercapai).
- 8) Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 82,98 serta capaiannya 86,10 (tercapai).
- 9) Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 66,27 serta capaiannya 82,41 (tercapai).

4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta juga dapat diperbandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lain dengan hasil sebagai berikut:

a. Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2025, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 13,80 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 13,30 tahun, Ini berarti Harapan Lama Sekolah penduduk Jakarta mengenyam pendidikan formal adalah 13,80 tahun atau setara Diploma 1, sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk secara nasional untuk mengenyam pendidikan adalah 13,30 tahun atau juga setara dengan Diploma 1. Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta meningkat 0,29% dari capaian tahun 2024 yang sebesar 13,51 tahun, Faktor pendorong pencapaian indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU, tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan, perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Dengan Capaian Nasional

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
DKI JAKARTA	13,08	13,33	13,51	13,80
INDONESIA	13,10	13,15	13,21	13,30

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2025, BPS

b. Pada Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah tahun 2025, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 11,59 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 9,07 tahun. Ini berarti penduduk Jakarta rata-rata telah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 11 jenjang Sekolah Menengah, serta mendekati target Pemerintah terkait Wajib Belajar 12 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah

secara nasional adalah 9,07 tahun atau rata-rata penduduk secara nasional baru menamatkan pendidikan formal hingga kelas 8 jenjang Sekolah Menengah. Jelas bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta berada di atas capaian nasional, sekaligus menjadi provinsi dengan peringkat pertama yang capaiannya tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hasil capaian Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah dengan Capaian Nasional

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
DKI JAKARTA	11,31	11,45	11,49	11,59
INDONESIA	8,69	8,77	8,85	9,07

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2025, BPS

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 10 (sepuluh) Indikator Program sebagai berikut:
- a. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, dengan target tahunan sebesar 90,83 serta capaiannya 93,14 (tercapai).
 - b. Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, dengan target tahunan sebesar 82,32 serta capaiannya 94,63 (tercapai).
 - c. Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS), dengan target tahunan sebesar 99,19 serta capaiannya 99,03 (tidak tercapai). Selisih ketidaktercapaian sebesar 0,16 mempertimbangkan karena eksploitasi anak, Disabilitas, kesadaran orang tua dan anak yang bekerja secara sadar, selain hal-hal tersebut juga berpengaruh pada proses perhitungannya terdapat usia 7 tahun yang sudah bersekolah di PAUD, dan usia 15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang menengah atas.
 - d. Persentase guru profesional, dengan Target Tahunan sebesar 88,80 serta capaiannya 89,63 (tercapai).
 - e. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A, dengan target tahunan sebesar 84,04 serta capaiannya 72,96 (tidak tercapai). Capaian belum optimal akibat adanya efisiensi anggaran pada BAN-PDM yang berdampak pada terbatasnya kuota pelaksanaan akreditasi. Kondisi ini terutama mempengaruhi satuan pendidikan yang saat ini berstatus terakreditasi B dan direncanakan untuk dilakukan penilaian ulang guna peningkatan status menjadi akreditasi A pada tahun berjalan

- f. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 82,98 serta capaiannya 86,1 (tercapai).
- g. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum, dengan target tahunan 66,27 serta capaiannya 82,41 (tercapai).
- h. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS), dengan target tahunan 80,59 serta capaiannya 88,22 (tercapai).
- i. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS), dengan target tahunan 49,44 serta capaiannya 89,17 (tercapai).
- j. Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS), dengan target tahunan 22,59 serta capaiannya 66,25 (tercapai).

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tabel 3.9. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,80	102%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.695.075.720.230	8.045.245.683.227	92,53%
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,51	11,59	100,69%	Program Pengelolaan Pendidikan	10.908.891.053.438	10.463.359.942.984	95,92%
							Jumlah	19.603.966.773.668	18.508.605.626.211	94,41%

Sasaran strategis Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan yang Berkualitas Bagi Semua dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki target di tahun 2025 sebesar 13,53 dengan realisasi 13,80 atau 102% (tercapai). Adapun sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Di segala Jenjang Satuan Pendidikan secara Tuntas dan Berkelanjutan dengan indikator sasaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki target di tahun 2025 sebesar 11,51 dengan realisasi 11,59 atau 100,69% (tercapai)

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

Tabel 3.10. Realisasi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Berdasarkan Program Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10.908.891.053.438	10.463.359.942.984	95,92%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.695.075.720.230	8.045.245.683.227	92,53%
JUMLAH	19.603.966.773.668	18.508.605.626.211	94,41%

3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

Tabel 3.11. Realisasi Penyerapan Anggaran di Dinas Pendidikan Berdasarkan Program Tahun 2025

NO	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	DINAS PENDIDIKAN	11.257.753.360.654	10.532.920.645.623	93,56%
2	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	282.710.751.186	259.002.925.945	91,61%
3	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	142.192.909.520	133.869.848.374	94,15%
4	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKSEL	298.598.417.065	286.287.016.191	95,88%
5	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	473.654.627.868	450.140.652.055	95,04%
6	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	164.979.037.173	155.372.786.248	94,18%
7	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	245.254.847.572	234.080.672.534	95,44%
8	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	203.446.095.553	190.683.631.082	93,73%
9	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKSEL	286.008.795.255	270.766.512.627	94,67%
10	SUKU DINAS PENDIDIKAN	418.139.588.415	400.083.973.357	95,68%

NO	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
	WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM			
11	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	204.350.428.348	196.080.393.478	95,95%
12	SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - KEP. SERIBU	44.467.665.813	41.639.451.325	93,64%
13	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.761.824.442.280	1.574.589.740.000	89,37%
14	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDIDIKAN	11.167.509.303	10.843.146.689	97,10%
15	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKBAR	13.580.791.225	13.202.851.492	97,22%
16	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKPUS	14.796.527.356	14.691.147.420	99,29%
17	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKSEL	14.179.780.827	13.878.387.240	97,87%
18	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKTIM	15.551.499.471	15.320.972.439	98,52%
19	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - JAKUT & KEP.SERIBU	12.342.925.324	12.036.129.000	97,51%
20	PUSAT PELAYANAN PENDANAAN PERSONAL DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	3.673.711.686.301	3.642.943.487.285	99,16%
21	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN	10.188.641.407	8.791.383.420	86,29%
22	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	3.901.544.181	3.764.933.740	96,50%
23	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	2.224.032.636	2.141.568.893	96,29%
24	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	5.547.029.321	5.421.117.483	97,73%
25	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	7.628.425.911	7.232.748.143	94,81%

NO	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
26	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	7.124.814.799	6.613.567.690	92,82%
27	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	3.504.030.040	3.314.895.223	94,60%
28	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	2.209.795.793	1.938.753.723	87,73%
29	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	4.910.554.807	4.568.509.347	93,03%
30	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	2.728.593.935	2.663.161.301	97,60%
31	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	4.123.928.904	4.066.695.438	98,61%
32	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	8.034.314.952	7.355.565.965	91,55%
33	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	3.129.380.473	2.298.355.441	73,44%
TOTAL		19.603.966.773.668	18.508.605.626.211	94,41%

Dari hasil capaian tahun 2025, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan budaya kerja di Dinas Pendidikan yang dibuktikan dengan integritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan. Integritas keselarasan antara target dengan realisasi seperti tercapainya target Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dapat dirasakan bagi seluruh warga Jakarta. Membangun kerjasama dan kemitraan yang efektif, baik antar SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat (BPMP Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta) dan dengan stakeholder pendidikan seperti Perguruan Tinggi, asosiasi profesi guru, Lembaga Pemerhati Pendidikan. Pekerjaan yang dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dilaporkan setiap triwulan pada sistem e-monev membuat penyerapan anggaran tahun 2025 lebih optimal. Munculnya gagasan pembaharuan untuk meningkatkan mutu layanan seperti inovasi sistem pelatihan Jaklat, pelaksanaan SPMB Bersama yang melibatkan sekolah swasta dan pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan berkeadilan untuk memastikan pendidikan dapat dirasakan secara merata bagi warga Jakarta melalui adanya jalur afirmasi yang dikhususkan bagi peserta didik dengan ekonomi menengah kebawah yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Swasta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan sudah menyajikan seluruh target indikator dan capaian kinerja, dan sudah di selaraskan antara dokumen renstra dan perjanjian kinerja;
2. Dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Dinas Pendidikan telah mencapai target masing-masing sebesar 13,80 dari target 13,53 atau 102% dan sebesar 11,59 dari target 11,51 atau 100,69%.
3. Dari 11 Indikator Kinerja, ada 1 indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target yaitu Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp18.508.605.626.211 dari anggaran Rp19.603.966.773.668.

B. Saran

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

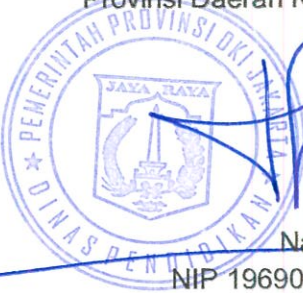
1. Perlu perencanaan yang lebih baik lagi sehingga penyerapan anggaran secara optimal dan kualitas dapat tercapai;
2. Memaksimalkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan membuat alternatif pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih efektivitas dan efisiensi berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai akan dibuat rencana aksi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan tersebut.

C. Rencana Tindak Lanjut

Demi menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan yang lebih baik sehingga penyerapan dapat dioptimalkan dan berkualitas;
2. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan melakukan evaluasi alternatif pelaksanaan kegiatan.
3. Menyusun rencana aksi dan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang belum mencapai target.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahdiana
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

PIHAK KEDUA,

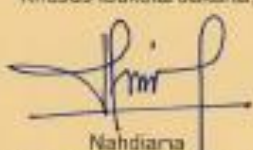
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Nahdiana
NIP : 196908061992012001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diassumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Metode Pengukuran : Sigma dari rasio jumlah penduduk berusia ≥ 7 tahun yang bersekolah pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ≥ 7 tahun pada tahun tersebut. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sumber Data : BPS	N/A	N/A	N/A	13,53	13,53	Tahun
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Metode Pengukuran : Jumlah lama sekolah penduduk ke-1 yang berusia 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Sumber Data : BPS	N/A	N/A	N/A	11,51	11,51	Tahun
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kerkurien Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar netizen yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/Login						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 65% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jikasaset.jakarta.go.id/inventarisasi/prlogin	5	25	55	100	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur ketepatan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = ((Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)) (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketepatan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penyediaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarsasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bigtor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (SPKD) Sumber Data akan dilah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarsasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Tertaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PDUKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Metode Pengukuran : (Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / (Semua dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4) x 100% Output Sasaran : Triwulan : Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral : Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Pental (Inspektoral)						
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,8%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Pencapaian 18,2%, dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW/IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW/II 2025 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
10	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Pembardaysan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UPP b. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik c. Keputusan Gubernur Nomor 428 Tahun 2022 tentang UPP Pelaksana SKM	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,09; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,04, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jakosurvei. Sumber Data : Jakosurvei						
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah diindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum diindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 30/05/2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,



Nandiana
NIP 196008061992012001

RENCANA AKSI KJABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	13,53	RA1. Meningkatkan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B pada jenjang PAUD	KK1.1. Terserapnya minimal 5 sebanyak 64% dari satuan PAUD yang terakreditasi	T/O1.1.1. Data pemetaan Satuan Pendidikan yang diisikan untuk proses akreditasi T/O1.1.2. Daftar Satuan Pendidikan binaan yang akan melakukan akreditasi dan Jadwal Pembinaan satuan pendidikan T/O1.1.3. Kegiatan pembinaan dalam persiapan akreditasi T/O1.1.4. Laporan hasil akreditasi minimal B pada jenjang PAUD	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Khusus
				RA2. Meningkatkan hasil ANBK Tahun 2024 dan pelaksanaan ANBK 2025	KK2.1. Tercapainya target hasil ANBK tahun 2024 pada jenjang: SD Numerasi = dari 52,82 menjadi 53,90 Literasi = dari 71,32 menjadi 72,00 SMP Numerasi = dari 66,93 menjadi 69,10 Literasi = dari 75,08 menjadi 75,60 SMA Numerasi = dari 69,40 menjadi 70,10 Literasi = dari 81,53 menjadi 82,20 SMK Numerasi = dari 59,36 menjadi 62,21 Literasi = dari 72,09 menjadi 75,26	T/O2.1.1. Laporan hasil dan evaluasi ANBK Tahun 2024	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
				KK2.2. Terselenggaranya pembinaan ANBK Tahun 2025	T/O2.2.1. Laporan pembinaan ANBK Tahun 2025: - Pembentukan TPPK - Perencanaan berbasis data	3 Laporan		TW III	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
				KK2.3. Tersedianya Laporan pelaksanaan ANBK tahun 2025	T/O2.3.1. Laporan pelaksanaan ANBK Tahun 2025 pada jenjang: SD sebanyak 2.050 satuan pendidikan SMP sebanyak 1.050 satuan pendidikan SMA sebanyak 450 satuan pendidikan SMK sebanyak 540 satuan pendidikan	3 Laporan		TW IV	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
				RA3. Meningkatkan akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu	KK3.1. Mekanisme pemberian penerima KUMU tidak tepat sasaran KK3.2. Tersedianya data hasil padanan tunggal untuk tahap II tidak duplikasi dan tepat sasaran KK3.3. Tersedianya laporan evaluasi implementasi pemberian KUMU dari keluarga yang tidak mampu	T/O3.1.1. SOP pemberian penerima KUMU tidak tepat sasaran T/O3.2.1. Data hasil padanan tunggal untuk tahap II (tidak duplikasi) dan tepat sasaran T/O3.3.1. Laporan Evaluasi implementasi pemberian KUMU	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	TW I TW II TW IV	Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
				RA4. Meningkatkan ketercapaian lulusan SMK melalui Bekerja, Melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berdiriususaha (BMW)	KK4.1. Adanya analisis kebutuhan Industri, Dunia Usaha dan Kerja (IDUKA) KK4.2. Bertambahnya PKS antara SMK Negeri dan swasta dengan IDUKA dan Perguruan tinggi KK4.3. adanya sertifikat kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dikeluarkan lembaga sertifikasi dengan target 85% dari peserta sertifikasi	T/O4.1.1. Data kebutuhan IDUKA terhadap kebutuhan kompetensi kejuruan SMK T/O4.2.1. Bertambahnya PKS antara SMK Negeri dan swasta dengan IDUKA dan Perguruan tinggi dari 125 menjadi 150 SMK T/O4.3.1. Dokumen sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi	1 Laporan 24 Dokumen PKS 1 Laporan	TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dari/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemanggung Jawab
					KK4.4. ketercapaian lulusan SMK melalui Bekerja, Melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha (BMW) sebesar 92%	T/O.4.4.1. Laporan ketercapaian lulusan SMK melalui Bekerja, Melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha (BMW)	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
2	Tertantannya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	11.51	RA1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan dana KJP Plus	KK1.1. Pemegang KJP Plus dapat menggunakan digital payment/ melalui aplikasi jakora mobile	T/O1.1.1. Laporan penggunaan dana KJP Plus	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
					KK1.2. Tersedianya Laporan distribusi dana KJP Plus Tahap I	T/O1.2.1. Laporan distribusi dana KJP Plus Tahap I	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
					KK1.3. Tersedianya Laporan distribusi dana KJP Plus Tahap II dan laporan penggunaan dana KJP Plus	T/O1.3.1. Laporan distribusi dana KJP Plus Tahap II dan laporan penggunaan dana KJP Plus	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
				RA2. Meningkatkan kompetensi pendidik non ASN melalui diklat berjenjang pada jenjang PAUD	KK2.1. Tersedianya peta kompetensi pendidik jenjang PAUD	T/O2.1.1. Data pendidik non ASN pada Jenjang PAUD yang sudah mengikuti diklat berjenjang	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					KK2.2. Adanya kegiatan pelaksanaan diklat berjenjang untuk pendidik PAUD dengan jumlah peserta: - Diklat dasar = 420 peserta - Diklat lanjut = 270 peserta - Diklat mahir = 210 peserta	T/O2.2.1. Laporan kegiatan pelaksanaan diklat tingkat dasar untuk pendidik PAUD T/O2.2.2. Laporan kegiatan pelaksanaan diklat tingkat lanjut untuk pendidik PAUD T/O2.2.3. Laporan kegiatan pelaksanaan diklat tingkat mahir untuk pendidik PAUD	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				RA3. Bertambahnya gedung satuan pendidikan jenjang SMP melalui program Unit Sekolah Baru (USB) dari 256 satuan menjadi 258 satuan. (SDN Tagai Alur 02/04, SDN Jati pulo 07/06, SDN Labak Bulus 04)	KK3.1. Terlaksananya proses pengadaan manajemen Konstruksi (MK)	T/O3.1.1. Dokumen kontrak pemenang tender	2 Dokumen	TW I	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
					KK3.2. Terlaksananya proses pengadaan sewa angkut dan sewa gudang	T/O3.2.1. Dokumen kontrak pemenang tender	2 Dokumen	TW II	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
					KK3.3. terlaksananya proses pengadaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan gedung	T/O3.3.1. Dokumen kontrak pemenang tender	2 Dokumen	TW III	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
					KK4.4. bertambahnya gedung satuan pendidikan jenjang SMP sebanyak 3 gedung	T/O4.4.1. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) gedung	3 Dokumen	TW IV	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
				RA4. Terlaksananya program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	KK4.1. Tersedianya daftar Satuan Pendidikan sebagai piloting Program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O1.1.1. Daftar Satuan Pendidikan sebagai piloting Program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	1 Dokumen	TW I	1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 2. Kepala Bidang Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
					KK4.2. Pencantuman nilai gizi jajanan pada Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O4.2.1. Tersedianya keterangan nilai gizi jajanan pada Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	1 Dokumen	TW II	1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 2. Kepala Bidang Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan
					KK4.3. Tersedianya contoh gambar desain Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O4.3.1. Contoh gambar desain Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	1 Dokumen	TW II	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
						T/O4.3.2. Gambar desain Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan pada SMKN 57, SMKN 63 dan SMANU MH Tugurek	1 Dokumen	TW II	Kepala UP, Prasarana dan Sarana Pendidikan
					KK4.4. tersedianya analisis optimalisasi infrastruktur Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O4.4.1. Dokumen analisis optimalisasi infrastruktur Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan pada SMKN 57, SMKN 63 dan SMANU MH Tugurek	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus dan Pelatihan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Pemangku Jawab
					KKA 5. Terlaksananya Program Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O4.5.1. Laporan kegiatan Pelaksanaan Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan pada SMKN 57, SMKN 63 dan SMANU MH Thamrin	1 Dokumen	TW II	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kedisn dan Pelatihan
					KKA 8. Terlaksananya Pemantauan Jatah Pelaksanaan Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan	T/O4.6.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Pelaksanaan Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan pada SMKN 57, SMKN 63 dan SMANU MH Thamrin	1 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, Kedisn dan Pelatihan 3. Kepala Bidang Program dan Anggaran
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah	Penerbitan implementasi rencana strategis komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategi pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Ketepatan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Tereaksikannya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
							1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
							1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
							1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Dinas
							1 Dokumen	TW II	Sekretaris Dinas
							1 Dokumen	TW III	Sekretaris Dinas
							1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Dinas
4	Terwujudnya Kesegaran Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Penerbitan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tereaksikannya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah divalidasi	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 50% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
							1 Laporan	TW III	
							1 Laporan	TW IV	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencsel	Target Rencsel	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPT/M dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPT/M dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW/IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
5.	Penerapannya tata kelola SDI yang baik melalui pemeliharaan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2025	1 Berita Acara	TW/IV	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW/I	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW/II	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW/III	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW/IV	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Gastos Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW/I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
				RA2. Mengumunkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penawaran (tenggol) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Tersusunnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (tenggol) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penawaran (tenggol) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW/I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis Kontrol/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis Kontrol/Surat Pesanan.	KK3.1. Terealisasi Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis Kontrol/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Terealisasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW/I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW/II	

Nomer	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab		
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Serap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 4. Para Kepala UPT 5. Para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badan Layanan Umum Daerah		
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Serap Kontak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV			
						RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 11 Wilayah 3. Para Kepala UPT
								T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	
								T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	
								T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	
						RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran
								T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran
								T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran
								T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melakukan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aspek Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
					T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
					T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran		
			RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran			
			RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran			
			RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran			

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Rencana	Target Rencana	Waktu	Pemangku Jawab
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem money Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-money	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada money Bappeda	1 Data	TW I	Kapala Bidang Program dan Anggaran
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyek/ penyerapan APBD dalam proyek/ APBD/ proyek/apbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem angket bulanan proyek/ penyerapan APBD dalam proyek/ APBD/ proyek/apbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyek/apbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Kapala Bidang Program dan Anggaran
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Kapala Bidang Program dan Anggaran
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Kapala Bidang Program dan Anggaran
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Kapala Bidang Program dan Anggaran
10	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	88,70	RA1. Melakukan analisis dan penyelesaian tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian rendah	KK1.1. Tersedianya data hasil analisis, strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.1.1. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat: - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.2. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat: - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat: - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Laporan pelaksanaan SKM yang memuat: - data hasil analisis penilaian unsur penilaian terendah periode berjalan - strategi dan/atau rencana tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode berjalan	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
					KK1.2. Tersedianya hasil tindak lanjut atas unsur Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil penilaian terendah	T/O1.2.1. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat: - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.2. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat: - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas
						T/O1.2.3. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat: - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O 1.2.4. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat: - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TUP-R BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran 1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Program dan Anggaran

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta



Pratiyo Anindyo

Jakarta, 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta,



Nabiliana
NIP. 196508031960312001

PRESTASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2025

PRESTASI JENJANG SEKOLAH DASAR

No.	Nama	Asal Sekolah	Wilayah	Bidang Lomba	Juara / Peringkat
1	Nathaniel Bryson Chandra	SDS Kristen X BPK Penabur	Jakarta Utara 1	IPA	MEDALI EMAS
2	Katryna Sofia Khairunnisa	SDN Pesanggrahan 02	Jakarta Selatan 1		MEDALI PERAK
3	Keira Zoe Holidjah	SDS Mutiara Bangsa 3	Jakarta Barat 2		MEDALI PERUNGGU
4	Marvent Joe Tanoto	SD Universal	Jakarta Pusat 2	MATEMATIKA	MEDALI EMAS
5	Ethan Forbes Churniawan	SD Santa Ursula	Jakarta Selatan 2		MEDALI PERAK
6	Dwitadeila Ekadiva Franjaya	SD Tzu Chi	Jakarta Utara 1		MEDALI PERAK
7	Darren Max Asrigo	SD Kristen 11 Penabur	Jakarta Utara 2		MEDALI PERUNGGU
8	Marvell Evodiaz Jaya	SD JAC	Jakarta Barat 2		MEDALI PERUNGGU
9	Jayden Ziev Lim	SD Kristen Penabur 03	Jakarta Pusat 2	IPS	MEDALI PERAK
10	Ryando Erlangga	SDN Srengseng Sawah 04	Jakarta Selatan 1		MEDALI PERUNGGU
11	Muhammad Alkhalifi Zikri Aqila	SDS Mentari Ar-Ridho Islamic School	Jakarta Timur 1		MEDALI PERUNGGU
12	Yuri Hafiz Wicaksono	SD Negeri Meruya Selatan 01 Pagi	Jakarta Barat 2		MEDALI PERUNGGU

13	Indira Sophie Humaira	SD IT Harum	Jakarta Utara 2		MEDALI PERUNGGU
14	Sally Stephanie Supardi	SD Dharma Suci 1	Jakarta Utara 1	Senam	Medali Emas
15	Fico Azka Novrantoro	SDN Kramat Jati 19	Jakarta Timur 2		Medali Perak
16	Muhammad Hanif Nazmi	SDN Batu Ampar 01	Jakarta Timur 2	Pencak Silat	Medali Emas
17	Mikayla Alkhansa	SDN Pekayon 05	Jakarta Timur 2		Medali Perunggu
18	Cokorde Gde Raditya Saputra	SDN Semanan 03	Jakarta Barat 1	Karate	Medali Perak
19	Nayla Annajwa	SDN Kelapa Gading Timur 01	Jakarta Utara 2	Kriya	Juara II
20	Abdullah Faqih	SDN Paseban 11 Pagi	Jakarta Pusat 2	Mendongeng	Juara II
21	Fakhirah Shakila Siregar	SDN Kebon Kosong 01 Pagi	Jakarta Pusat 2	Gambar Ekspresi	Juara Harapan I
22	Atalick Keenan Arianto	SDN Srengseng Sawah 12	Jakarta Selatan 1	Pantomim	Juara Harapan II
23	Athar Rizki Al Khalifi				

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Nama Lomba	Tingkat Perlombaan	Medali / Juara Yang Diraih	Nama Siswa	Nama Satuan Pendidikan	Cabang Lomba
1	OSN	Nasional	Medali Emas	Winny Amabelle Hanjaya	SMPK 2 Penabur	IPA
2	OSN	Nasional	Medali Perak	Darrell Blessthee Hutagalung	SMPK 2 Penabur	IPA
3	OSN	Nasional	Medali Perunggu	Benedict Luvenco Pardin	SMPS Narada	IPA
4	OSN	Nasional	Medali Perunggu	Niel Rizqullah Ervatra	SMPN 115	IPA
5	OSN	Nasional	Medali Emas	Aqila Zhafira Nugroho	SMPN 41	IPS
6	OSN	Nasional	Medali Emas	Kiara Nadhiva Lihu	SMPN 115	IPS
7	OSN	Nasional	Medali Perak	Aydin Yusuf Furqan	SMP Islam Al - Azhar 1	IPS
8	OSN	Nasional	Medali Perak	Dafa Syamil Adz Dzaki	SMPN 24	IPS
9	OSN	Nasional	Medali Emas	Peter Euan Ridjab	SMP Kanisius	Matema tika
10	OSN	Nasional	Medali Perak	Darrent Franscesco	SMPN 224	Matema tika
11	OSN	Nasional	Medali Emas	Ali Kayana Aldea	SMPN 252	Matema tika
12	OSN	Nasional	Medali Perunggu	Arkan Danisaiman	SMP Al Wildan 4 Islamic School Jakarta	Matema tika

13	GSI	Nasional	Pemain belakang terbaik	FARUQ AL GHIFARI	SMP N 244 JAKARTA	Sepak Bola
14	GSI	Nasional	Gelandang terbaik	ILHAM MAULIDAN	SMP N 71 Jakarta	Sepak Bola
15	FLS3N	Nasional	Harapan 1	Muhammad Fakhri Athalariksyah	SMP Negeri 85 Jakarta	Ansambel Campuran 3 Alat Musik
16	FLS3N	Nasional	Harapan 1	Loviersya Elleanore	SMP Negeri 85 Jakarta	Ansambel Campuran 3 Alat Musik
17	FLS3N	Nasional	Harapan 1	Belinda Bitakania	SMP Negeri 85 Jakarta	Ansambel Campuran 3 Alat Musik
18	FLS3N	Nasional	Juara 1	Aubrey Zada Hirok	SMP Negeri 19 Jakarta	Mendongeng
19	FLS3N	Nasional	Juara 1	Azkia Rizki Amalia	SMP Negeri 1 Jakarta	Ilustri
20	O2SN	Nasional	Medali Emas	Florin Adara Ramadhani	SMP Negeri 7 Jakarta	Karate
21	O2SN	Nasional	Medali Perunggu	Muhammad Rasyid Ridho	SMP Negeri 4 Jakarta	Karate
22	O2SN	Nasional	Medali Emas	Nezar Habibi	SMP Negeri 272 Jakarta	Pancak Silat

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

PRESTASI JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Tingkat Provinsi

No.	Ajang yang diikuti	BIDANG LOMBA/CABOR	JUARA	NAMA PEMENANG
1	LKS	Teknik Pemasangan Batu Bata (Bricklaying)	I	Muhammad Ashraff Darmawan
2	LKS	Teknik Pemasangan Batu Bata (Bricklaying)	II	Sadam Mul Ailmy
3	LKS	Teknik Pemasangan Batu Bata (Bricklaying)	III	Imam Abdul Khair
4	LKS	Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical Installation)	I	Adrian Ahmad Kenzi
5	LKS	Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical Installation)	II	Achmad Wildan Abqori
6	LKS	Teknik Instalasi Kelistrikan (Electrical Installation)	III	Muhammad Kholidi Hamdika
7	LKS	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (Wall and Floor Tilling)	I	Rendy Yudhistira
8	LKS	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (Wall and Floor Tilling)	II	Zaki Ahmad Syafiq
9	LKS	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (Wall and Floor Tilling)	III	Dafa Kurniawan

10	LKS	Teknik Tata Udara dan Pendingin (Refrigeration and Air Conditioning)	I	Keitaro Athallah
11	LKS	Teknik Tata Udara dan Pendingin (Refrigeration and Air Conditioning)	II	Nabil Dwi Kurniawan
12	LKS	Teknik Tata Udara dan Pendingin (Refrigeration and Air Conditioning)	III	Febbry Hariyanto
13	LKS	CAD Building (3D Modelling/Building Information Modeling)	I	Fathan Ghifari Ramadhan dan Fabregas Kennedy
14	LKS	CAD Building (3D Modelling/Building Information Modeling)	II	Rafa Nabil Siraj dan Khristoforus Frederikus Moniaga
15	LKS	CAD Building (3D Modelling/Building Information Modeling)	III	Rayyan Haris dan Fariz Rifqi Mukhtarullah
16	LKS	Robot Manufacturing System	I	Fariz Akbar dan Muhammad Rofi Osama
17	LKS	Robot Manufacturing System	II	Dwi Ramadhani dan Vina Febriyanti
18	LKS	Robot Manufacturing System	III	Muhammad Fahri dan Rasti Amanda
19	LKS	Robotika Mobile (Mobile Robotics)	I	Muh. Alif Afdal Defreeyansyah dan Satria Dwi Kurniawan Diasjati
20	LKS	Robotika Mobile (Mobile Robotics)	II	Kafha Maulia Sovamena dan Faiz Adiputra
21	LKS	Robotika Mobile (Mobile Robotics)	III	Muhammad Fa'iz Dwi Adhiski dan Baruna Hidayatul Iلمي

22	LKS	Mekatronika (Mechatronics)	I	Danendra Fauzan Akrom dan Rezky Surahmat
23	LKS	Mekatronika (Mechatronics)	II	Faris Firmandani dan Najwa Khairu Nur Anisa
24	LKS	Mekatronika (Mechatronics)	III	Abu Bakar dan Jeremy Alhaezer Hutasoit
25	LKS	Elektronika (Electronics)	I	Muhammad Kenzi Anovahri
26	LKS	Elektronika (Electronics)	II	Syuhada Taqwa Fillah
27	LKS	Elektronika (Electronics)	III	Bisma Riyanto
28	LKS	Sistim Kendali Industri (Industrial Control)	I	Naufal Abdillah Destavan
29	LKS	Sistim Kendali Industri (Industrial Control)	II	Abujuan Ahmad Fadillah
30	LKS	Sistim Kendali Industri (Industrial Control)	III	Alfahrin Juniyansah
31	LKS	Teknik Perancangan Permesinan CAD (Mechanical Engineering CAD)	I	Rahmat Hermawan
32	LKS	Teknik Perancangan Permesinan CAD (Mechanical Engineering CAD)	II	Daffa Cahya Fadillah
33	LKS	Teknik Perancangan Permesinan CAD (Mechanical Engineering CAD)	III	Sigit Waluya Jati
34	LKS	Teknik Pengelasan (Welding)	I	Achmad Huzaini

35	LKS	Teknik Pengelasan (Welding)	II	Abdulloh Syukri Alfachri
36	LKS	Teknik Pengelasan (Welding)	III	Wisnu Aji Saputra
37	LKS	Teknik Perbaikan Body Mobile (Autobody Repair)	I	Riza Arsyah Arrazy
38	LKS	Teknik Perbaikan Body Mobile (Autobody Repair)	II	Muhamad Luthfi Hanif
39	LKS	Teknik Perbaikan Body Mobile (Autobody Repair)	III	Muhammad Irzam Ramadhan
40	LKS	Motorcycle (TSM)	I	Azhari Ivani
41	LKS	Motorcycle (TSM)	II	Sayid Muhammad Yasir
42	LKS	Motorcycle (TSM)	III	Fadlika Basamalah
43	LKS	Teknologi Otomotif Mobil (Automobile Technology)	I	Adrian Saviola
44	LKS	Teknologi Otomotif Mobil (Automobile Technology)	II	Abdul Hanafi
45	LKS	Teknologi Otomotif Mobil (Automobile Technology)	III	Nur Fajar Febrianto
46	LKS	Metrology	I	Ravael Saputra Ruriansyah
47	LKS	Metrology	II	Muhamad Elmiro Mubarak
48	LKS	Metrology	III	Ananda Farras Halomoan
49	LKS	Alat Berat (Heavy Equipment)	I	Alifian Rachmansyah Putra dan Kesfi Fadly

50	LKS	Alat Berat (Heavy Equipment)	II	Diki Mulyadi dan Moh. Afrido
51	LKS	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (IT Software Solution for Business)	I	Muhammad Ramadian Ramadhan
52	LKS	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (IT Software Solution for Business)	II	Abby Dahlan Havizh
53	LKS	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (IT Software Solution for Business)	III	Roihan Fajareno
54	LKS	Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (IT Network System Administration)	I	Maulana Akbar
55	LKS	Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (IT Network System Administration)	II	M. Ridho Irwansyah
56	LKS	Teknologi Informasi Sistem Administrasi Jaringan (IT Network System Administration)	III	Lu'lu'ah Nafisa
57	LKS	Komputasi Awan (Cloud Computing)	I	Filzah Yufi Athenavril
58	LKS	Komputasi Awan (Cloud Computing)	II	Ibrahim Muliatama
59	LKS	Komputasi Awan (Cloud Computing)	III	Fardhan Rasya Hafist
60	LKS	Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security)	I	Muhammad Faiz Hidayat dan Muhammad Rakha
61	LKS	Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security)	II	Zahir Hadi Athallah dan Fikrah Fathoni Siregar

62	LKS	Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security)	III	Fase Rais Baradika dan Rafidan Athari
63	LKS	Kabel Jaringan Komputer Informasi (Information Network Cabling)	I	Muhamad Isnan Fauzi Pamungkas
64	LKS	Kabel Jaringan Komputer Informasi (Information Network Cabling)	II	Ibrahim Rahman Shaleh
65	LKS	Kabel Jaringan Komputer Informasi (Information Network Cabling)	III	Abel Rasendriya Zaki
66	LKS	Farmasi	I	Maharani Buleuen
67	LKS	Farmasi	II	Luthfiyyah Husna Rahmahdhani
68	LKS	Farmasi	III	Raissa Marroh Delima
69	LKS	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (Health and Social Care)	I	Aura Umayya
70	LKS	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (Health and Social Care)	II	Hanna Patma Putri
71	LKS	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (Health and Social Care)	III	Umar Razan Abyantoro
72	LKS	Hairdressing	I	Evril Ennu Alvariza
73	LKS	Hairdressing	II	Zhahara Sekar Arum Putri
74	LKS	Hairdressing	III	Nafillah Petrina Zanzabila
75	LKS	Beauty Therapy	I	Annisa Ghina Maharani

76	LKS	Beauty Therapy	II	Syarifah Kayla
77	LKS	Beauty Therapy	III	Nada Natalin Elsaday
78	LKS	Lanskap dan Pertamanan (Landscape and Gardening)	I	Revan Daniar Rahman dan Muhammad Oknur Fathir
79	LKS	Lanskap dan Pertamanan (Landscape and Gardening)	II	Zaldhi Muttaqin dan Ezzar Aulia Putra
80	LKS	Lanskap dan Pertamanan (Landscape and Gardening)	III	Zahra Bella Nurhaliza dan Febbyana Syukmana Dindya Renza
81	LKS	Nautika	I	Rendy Putra Aulia Taryana
82	LKS	Nautika	II	Muhammad Zaid Zindan
83	LKS	Nautika	III	Rizkymullah Alfiansyah
84	LKS	Fishery	I	Zefanya Alexa
85	LKS	Fishery	II	Muhammad Fadel
86	LKS	Digital Marketing	I	Natasha
87	LKS	Digital Marketing	II	Nazwa Zulaykha
88	LKS	Digital Marketing	III	Juwita Maharani
89	LKS	Pelayanan Restoran (Restaurant Service)	I	Siti Sarah
90	LKS	Pelayanan Restoran (Restaurant Service)	II	Great Indaka Zikri

91	LKS	Pelayanan Restoran (Restaurant Service)	III	Fiona Elysia
92	LKS	Hotel Resepsionis (Hotel Reception)	I	Kaila Musdalifah Sapitri
93	LKS	Hotel Resepsionis (Hotel Reception)	II	Ragustine Dinamista
94	LKS	Hotel Resepsionis (Hotel Reception)	III	Joana Keisya Cleary
95	LKS	Teknik Desain Laman (Web Technologies)	I	Bima Ananta Al Baihaqi
96	LKS	Teknik Desain Laman (Web Technologies)	II	Setio Nugraha
97	LKS	Teknik Desain Laman (Web Technologies)	III	Muhammad Farhan Gunawan
98	LKS	Fashion Technology	I	Muhammad Imam Firdaus
99	LKS	Fashion Technology	II	Az'zahra Artika Wijaya
100	LKS	Fashion Technology	III	Auliya Bintang Miftahul Jannah
101	LKS	3D Game Art	I	Elang Satriani Ramadhan
102	LKS	3D Game Art	II	Engrasia Windya Ardine
103	LKS	3D Game Art	III	Aliyya Najma Putri Batubara
104	LKS	Pembuatan Kabinet (Cabinet Making)	I	Ricardo Simbolon
105	LKS	Pembuatan Kabinet (Cabinet Making)	II	Samuel Adventus Toorop

106	LKS	Pembuatan Kabinet (Cabinet Making)	III	Rahmat Hidayat
107	LKS	Teknologi Desain Grafis (Graphic Design Technology)	I	Aqilla Asnah
108	LKS	Teknologi Desain Grafis (Graphic Design Technology)	II	Marvel Jason Handoyo
109	LKS	Teknologi Desain Grafis (Graphic Design Technology)	III	Adila Ibnu Munthoha
110	LKS	Robot Welding	I	Haikal Alif Rachman
111	LKS	Robot Welding	II	Marco Aliyandra
112	LKS	Robot Welding	III	Regan Hezekiah Santoso
113	LKS	O2SN	I	Ferdi Alfiansyah
114	LKS	O2SN	II	Aditya Rangga Syahputra
115	LKS	O2SN	III	Sutan Arifin Johan Nizar
116	LKS	O2SN	I	Siti Kayla Avedudde
117	LKS	O2SN	II	Sabrina Farahiyah
118	LKS	O2SN	III	Shafira Nur Aziza
119	LKS	O2SN	I	Lionel Ar Razzak Wikarta
120	LKS	O2SN	II	Fatih Azizi

121	LKS	O2SN	III	Andreas Patria Tampubolon
122	LKS	O2SN	I	Aisyah Aprilianti
123	LKS	O2SN	II	Maharani Putri Wijaya
124	LKS	O2SN	III	Lovly Liban Titania
125	FIKSI	Kesehatan	I	Indah Laila Izzati dan Nasywa Haura Ramadhani
126	FIKSI	Kriya	I	Fallah Al Farizi dan Nur Syifa Amelyya Suherman
127	FIKSI	Kuliner	I	Syesa Sayyidina dan Millati Azka Effendi
128	FIKSI	Pariwisata	I	Ahmad Rizky dan Kirana Akira Narasian
129	FIKSI	Pariwisata	I	Fathiha Almatta dan Kinanti Itsnayni S.

Tingkat Nasional

No.	Bidang Lomba	Nama	Asal SMK	Perolehan Medali
1	Teknik Instalasi Kelistrikan (<i>Electrical Installation</i>)	Adrian Ahmad Kenzi	SMKN 1 Jakarta	Perak

2	Teknik Pemasangan Tegel Keramik Dinding dan Lantai (<i>Wall and Floor Tiling</i>)	Rendy Yudhistira	SMKN 1 Jakarta	Perunggu
3	CAD Building (<i>3D Modelling /Building Information Modeling</i>)	Fathan Ghifari Ramadhan	SMKN 52 Jakarta	Perunggu
		Fabregas Kennedy		
4	<i>Robot Manufacturing System</i>	Fariz Akbar	SMKN 56 Jakarta	Perunggu
		M. Rofi Osama	SMKN 56 Jakarta	
5	Robotika Mobile (<i>Mobile Robotics</i>)	Muhammmad Alif Afdal D.	SMKN 4 Jakarta	Perak
		Satria Dwi Kurniawan Diasjati		
6	Sistim Kendali Industri (<i>Industrial Control</i>)	Naufal Abdillah Destavan	SMKN 1 Jakarta	Perunggu
7	Teknik Perbaikan Body Mobile (<i>Autobody Repair</i>)	Riza Arsyah Arrazy	SMKN 26 Jakarta	Perunggu
8	Teknologi Otomotif Mobil (<i>Automobile Technology</i>)	Adrian Saviola	SMKN 4 Jakarta	Emas
9	<i>Metrology</i>	Ravael Saputra Ruriansyah	SMKN 1 Jakarta	Perunggu

10	Alat Berat (<i>Heavy Equipment</i>)	Alfian Rachmansyah	SMKN 36 Jakarta	Perunggu
		Kesfi Fadly		
11	Teknologi Informasi Piranti Lunak untuk Bisnis (<i>IT Software Solution for Business</i>)	Muhammad Ramadian Ramadhan	SMKN 24 Jakarta	Perunggu
12	Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>)	Filzah Yufi A.	SMKN 10 Jakarta	Emas
13	Teknologi Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>)	Muhammad Faiz Hidayat	SMKN 40 Jakarta	Perunggu
		Muhammad Rakha		
14	Kabel Jaringan Komputer Informasi (<i>Information Network Cabling</i>)	Muhamad Isnan Fauzi Pamungkas	SMKS Telkom Sandhy Putra	Perunggu
15	Keperawatan Kesehatan dan Sosial (<i>Health and Social Care</i>)	Aura Umayya	SMKN 28 Jakarta	Perak
16	<i>Hairdressing</i>	Evril Ennu	SMKN 27 Jakarta	Perak
17	<i>Beauty Therapy</i>	Annisa Ghina Maharani	SMKN 27 Jakarta	Perak
18	Nautika	Rendi Putra Aulia T.	SMKN 36 Jakarta	Emas
19	<i>Digital Marketing</i>	Natasha	SMKN 9 Jakarta	Perak

20	Pelayanan Restoran (<i>Restaurant Service</i>)	Siti Sarah	SMKN 27 Jakarta	Perak
21	Hotel Resepsionis (<i>Hotel Reception</i>)	Kaila Musdalifah Sapitri	SMKN 37 Jakarta	Perunggu
22	Teknik Desain Laman (<i>Web Technologies</i>)	Bima Ananta Al Baihaqi	SMKN 2 Jakarta	Emas
23	3D Game Art	Elang Satria Ramadhani	SMKN 6 Jakarta	Perunggu
24	Pembuatan Kabinet (<i>Cabinet Making</i>)	Ricardo Simbolon	SMKN 52 Jakarta	Perak
25	Teknologi Desain Grafis (<i>Graphic Design Technology</i>)	Aqilla Asnah	SMKN 58 Jakarta	Perunggu
26	Robot Welding	Haikal Alif Rachman	SMKN 68 Jakarta	Perak
27	Pencak Silat Putri	Sabrina Farahiyah	SMKN 57 Jakarta	Emas
28	Kuliner	Syesa Sayyidina dan Millati Azka Effendi	SMKN 51 Jakarta	Emas
29	Monolog	Kethrin Gracella Sitorus	SMKN 13 Jakarta	Perak